

2021-2026



RENCANA STRATEGIS

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Berau**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dengan adanya Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat menjadi Instansi Pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau ini kami sampaikan.

Tanjung Redeb, 08 September 2021

Pt. Kepala Dinas PPKBP3A,



Ir. Hj. Dahniar Ratnawati, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640313 199203 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. LANDASAN HUKUM	I-4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I-7
1.3.1. MAKSUD	I-7
1.3.2. TUJUAN	I-8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	II-1
2.1.1. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-1
2.1.2. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-1
2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-2
2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	II-6
2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-6

2.2.2. Sarana dan Prasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-7
2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	II-9
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-15
2.4.1. Tantangan	II-15
2.4.2. Peluang	II-15
2.4.3. Kekuatan	II-16
2.4.4. Kelemahan	II-16

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH	III-1
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS P2KBP3A KABUPATEN BERAU	III-1
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	III-13
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	III-18
3.3.1. Telaahan Renstra Kementrian PPPA	III-18
3.3.2. Telaahan Renstra BKKBN	III-20
3.3.3. Telaahan Renstra DKP3A Provinsi Kaltim	III-22
3.4. TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-24
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS	III-25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DP2KBP3A	IV-1
---	------

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANV-1

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... VI-1

6.1 LATAR BELAKANG	VI-1
--------------------------	------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	VII-1
7.1 LATAR BELAKANG	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas PPKBP3A per Desember 2020	II-7
Tabel 2.2 Data PTT Dinas PPKBP3A per Desember 2020	II-7
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020	II-7
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-10
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau	II-12
Tabel 3.1 Permasalahan utama pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau.....	III-1
Tabel 3.1.a Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani pada UPTD PPA Kabupaten Berau tahun 2015 – 2020	III-9
Tabel 3.1.b Data Capaian Realisasi CPR Kabupaten Berau tahun 2015 – 2020	III-9
Tabel 3.1.c Target Kinerja Sasaran Program Bangga Kencana Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024	III-10
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	III-14
Tabel 3.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan	

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran KPPA	III-18
Tabel 3.3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Sasaran Strategis BKKBN	III-20
Tabel 3.3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau Terhadap Sasaran Strategis DKP3A Provinsi Kaltim	III-23
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III-25
Tabel 3.5.1 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-26
Tabel 3.5.2 Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-26
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026.....	IV-2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A Kabupaten Berau.....	IV-5
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021-2026.....	VI-2
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Dokumen Lainnya	I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	II-2

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolak ukur capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya

meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

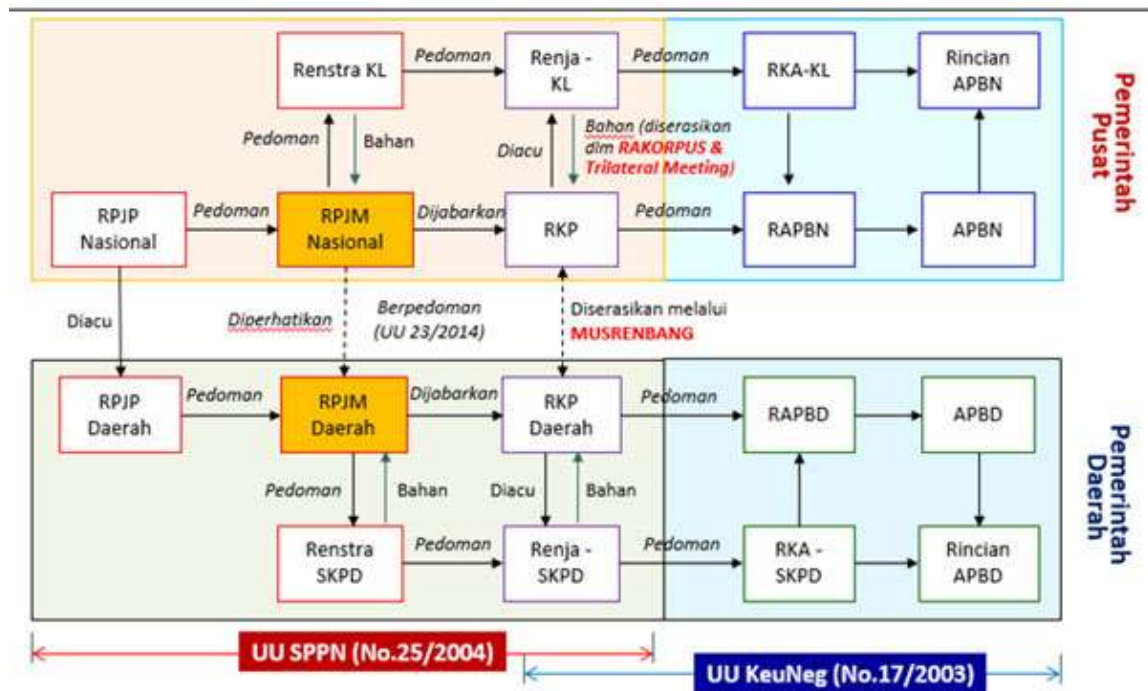
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Kutai Barat dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi..

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
21. Peraturan Bupati Berau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1.Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar

berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau.

1.3.2.Tujuan

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;
- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

BAB PENUTUP

VIII Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta bidang Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

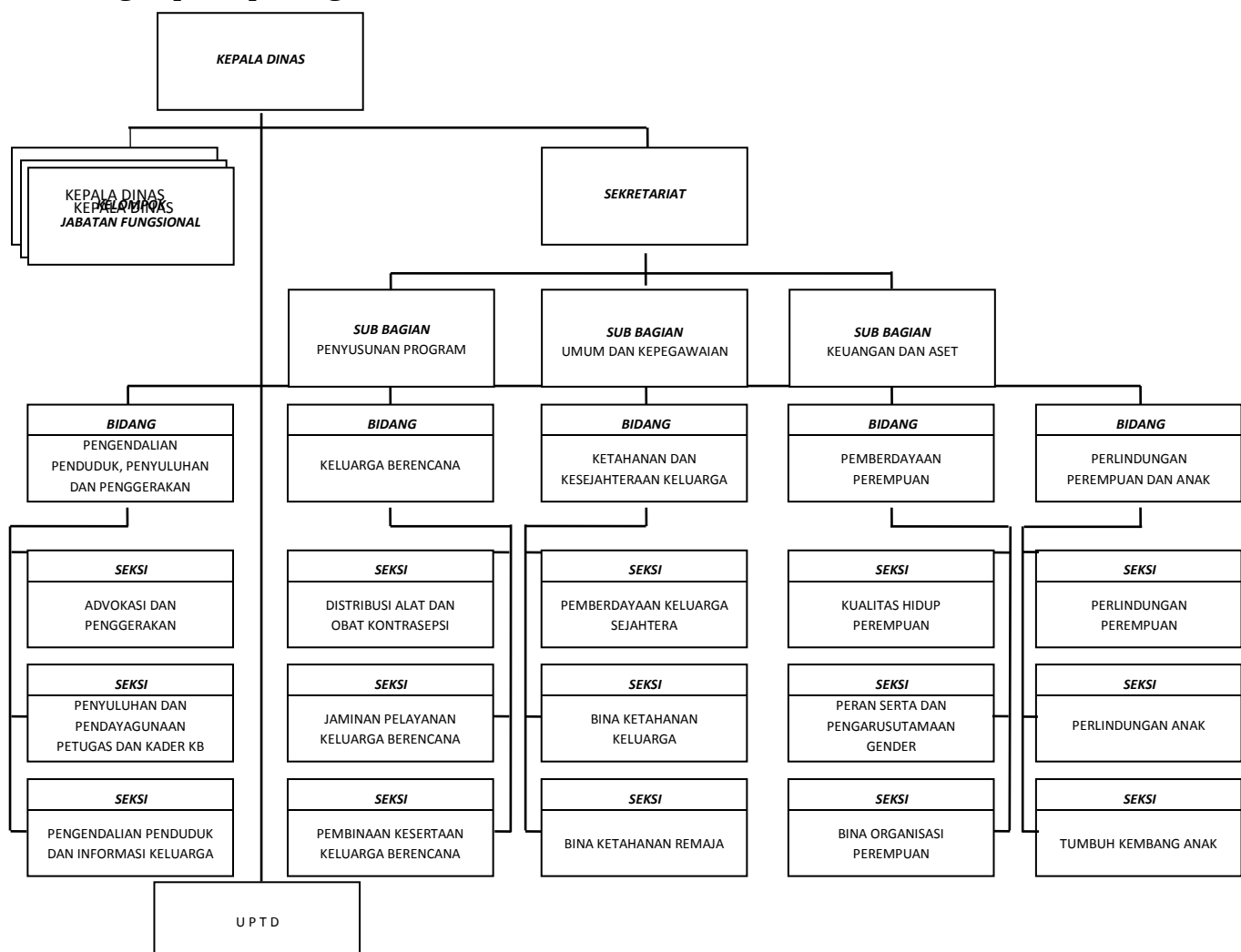
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang

- pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 5 (lima) Bidang seperti pada gambar 2.1 berikut :



Gambar 2.1 (Struktur Organisasi)

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan bertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau lainnya.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Dinas.

- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Dinas.
- e. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Dinas.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan yang meliputi advokasi dan penggerakan, penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana serta pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- g. Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan di bidang advokasi dan penggerakan.
- h. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas dan Kader Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan petugas dan kader keluarga berencana.
- i. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- j. Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang keluarga berencana yang meliputi distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon), jaminan pelayanan keluarga berencana dan pembinaan

kesertaan keluarga berencana.

- k. Seksi Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang distribusi alat dan obat kontrasepsi (Alokon).
- l. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang jaminan pelayanan keluarga.
- m. Seksi Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Keluarga Berencana di bidang pembinaan kesertaan keluarga berencana.
- n. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi pemberdayaan keluarga sejahtera, bina ketahanan keluarga dan bina ketahanan remaja.
- o. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera.
- p. Seksi Bina Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan keluarga.
- q. Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang bina ketahanan remaja.
- r. Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi kualitas hidup perempuan, peran serta dan pengarusutamaan gender bina organisasi perempuan.

- s. Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang kualitas hidup perempuan.
- t. Seksi Peran Serta dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang peran serta dan pengarusutamaan gender.
- u. Seksi Bina Organisasi Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan di bidang bina organisasi perempuan.
- v. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang kesejahteraan perempuan dan anak yang meliputi perlindungan perempuan, perlindungan anak dan tumbuh kembang anak.
- w. Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan perempuan.
- x. Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan anak.
- y. Seksi Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di bina tumbuh kembang anak.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kab Berau

Sampai dengan akhir Desember tahun 2020 jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sebanyak 64 (Delapan Puluh Lima) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 37 (Tiga Puluh Delapan) orang, sedangkan Tenaga Kerja Non PNS/PTT sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) orang. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.1 Data Pegawai Dinas PPKBP3A per Desember 2020

Pangkat Gol. Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
5	25	7	-	12	25	-	6	20	-	11	-	-	

Tabel 2.2 Data PTT Dinas PPKBP3A per Desember 2020

Jenis Kelamin		Pendidikan							Jumlah PTT
L	P	S3	S2	S1	SM/D3	SLTA	SLTP	SD	
12	25	-	6	20	-	11	-	-	27

2.2.2. Sarana Dan Prasaran Dinas Peengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Per Tahun 2020

No	Nama/Jenis Barang	Volumen/Satuan	Tahun Pembelian	Kondisi
1	Sepeda Motor	1 Buah	2000	Rusak Berat
		1 Buah	2001	Kurang Baik
		1 Buah	2003	Rusak Berat
		1 Buah	2003	Kurang Baik
		5 Buah	2007	Rusak Berat

No	Nama/Jenis Barang	Volumen/Satuan	Tahun Pembelian	Kondisi
		2 Buah	2007	Kurang Baik
		1 Buah	2007	Baik
		1 Unt	2009	Kurang Baik
		2 Buah	2010	Baik
		9 Buah	2012	baik
		2 Buah	2013	baik
		4 Buah	2018	baik
		3 Buah	2019	baik
2	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1 Buah	2000	Kurang Baik
		3 Buah	2001	Baik
		6 Buah	2001	Rusak Berat
		4 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2005	Rusak Berat
3	Meja Tulis	2 Buah	2000	Kurang Baik
		3 Buah	2001	Baik
		3 Buah	2001	Kurang Baik
		4 Buah	2001	Rusak Berat
		3 Buah	2005	Kurang Baik
		1 Buah	2005	Baik
		2 Buah	2007	Kurang Baik
		1 Buah	2007	Baik
4	PC Unit	1 Buah	2000	Rusak Berat
		1 Buah	2001	Rusak Berat
		1 Buah	2002	Rusak Berat
		1 Buah	2005	Rusak Berat
		1 Buah	2008	Baik
		1 Buah	2008	Rusak Berat
		2 Buah	2009	baik
		3 Buah	2010	Baik
		6 Buah	2011	baik
		8 Buah	2013	baik
		3 Buah	2018	baik
		5 Buah	2019	baik
5	Filling Besi/Metal	1 Buah	2001	Kurang Baik
		1 Buah	2002	Rusak Berat
		1 Buah	2002	Kurang Baik
		1 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2005	Kurang Baik
		4 Buah	2012	Baik
6	Kursi Putar	3 Buah	2001	Rusak Berat
		1 Buah	2005	Kurang Baik
7	Kursi Lipat	2 Buah	2001	Rusak Berat
		3 Buah	2005	Baik
		1 Buah	2008	Kurang Baik
		1 Buah	2010	baik
		34 Buah	2014	baik
8	Meja Komputer	3 Buah	2001	Kurang Baik
9	Meja Biro	2 Buah	2001	Rusak Berat
10	Kursi Plastik	4 Buah	2001	Rusak Berat

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau terbuat dalam tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	14,9	19,15	23,4	29,8	38,3	14,9	19,15	42,6	42,6	Na	100	100	182,0513	142,953	Na
2	Persentase Penanganan kasus kekerasan pada Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	Na	100	100	100	100	Na
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Nindia	Pratama	Pratama	Pratama	Pratama	Na	Tercapai	Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	Na
4	Presentase Pemakaian Kontraepsi (CPR)	74,75	75,66	75,84	76,03	76,95	74,75	75,66	76,54	74,24	Na	100%	100%	101%	98%	Na

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat di temukan beberapa kesenjangan/hal-hal yang belum tercapat antara lain:

Berdasarkan matrik hasil pencapaian pelayanan perangkat daerah dari tabel 2.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2017-2020 secara umum sudah baik. Dari segi pencapaian target indicator yang dibuat pada renstra periode sebelum sudah mengalami perbaikan. Akan tetapi masih ada beberapa indicator yang mengalami penurunan pencapaian, seperti pada indicator Tingkat Capaian Kota Layak anak (belum tercapai dari target renstra periode sebelumnya) dan Presentase Pemakaian Konstrasepsi (yang juga tidak tercapai).

Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau

NO.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Realisasi Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					Rasio Rata Rata
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	1.069.637.353	1.474.703.790	1.644.543.500	1.779.267.979	1.962.122.480	1.069.637.353	1.474.703.798	1.600.881.781	1.300.374.084	-	100	100	97	73	-	93
02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	-	89.745.000	131.500.000	134.500.000	144.500.000	-	89.745.000	142.325.000	-	-	-	100	108	-	-	104
03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	%	-	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
04.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	-	41.323.900	15.000.000	15.000.000	50.000.000	-	41.323.900	-	-	-	-	100	-	-	-	100
05.	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan	%	5.000.000	38.880.000	69.300.000	50.000.000	70.500.000	4.320.000	36.880.000	62.593.450	20.000.000	-	86	95	90	40	-	78

NO.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Realisasi Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					Rasio Rata Rata
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
06.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	%	1.097.070.178	1.386.863.523	1.775.777.000	2.414.600.000	2.685.000.000	1.097.070.178	1.366.863.523	1.689.381.468	1.374.503.352	-	100	99	95	57	-	88
07.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	%	-	109.375.000	109.375.000	139.375.000	189.375.000	-	-	-	48.112.000	-	-	-	-	35	-	35
08.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	%	67.801.000	378.065.000	550.817.000	609.315.000	815.505.000	153.783.900	322.560.000	523.718.300	200.141.800	-	227	85	95	33	-	110
09.	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	85.982.900	232.962.052	387.551.000	370.318.000	47.031.800		162.644.052	287.469.393	135.363.000	-	-	70	74	37	-	60
10.	Program Keluarga Berencana	%	1.510.894.000	4.056.659.000	4.989.237.000	4.528.574.000	5.705.000.000	588.992.500	2.295.926.950	3.041.340.274	2.940.847.262	-	39	57	61	65	-	111
11.	Program Pelayanan Kontrasepsi	%	149.161.900	209.968.000	-	-	-	149.161.900	209.968.000	-	-	-	100	100	-	-	-	100

NO.	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Realisasi Renstra Perangkat daerah Pada Tahun Ke					Rasio Capaian Tahun Ke					Rasio Rata Rata
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
12.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	%	291.966.300	540.576.499	269.160.000	285.204.000	335.306.000	295.966.300	505.426.499	219.717.924	110.334.068	-	101	93	82	39	-	158
Jumlah			4.277.513.631	8.574.121.764	9.962.260.500	10.346.153.979	12.024.340.280	3.358.932.131	6.506.041.722	7.567.427.590	6.129.675.566							
Rata - Rata																		94

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi dapat dikategorikan baik. Tingkat rasio rata-rata 94% Hal ini menandakan perencanaan berlangsung baik.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat ditemukan beberapa tantangan dan peluang bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan yang ada antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman dari OPD dan masyarakat (kampung dan kelurahan tentang KLA.
2. Belum sinkronnya perencanaan pemenuhan hak anak antar OPD terkait.
3. Belum optimalnya Gugus Tugas KLA di Kabupaten Berau
4. Aksesibilitas yang masih rendah terhadap pelayanan KB
5. Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga pemahaman terhadap Program Bangga Kencana masih kurang
6. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi.

2.4.2 Peluang

1. Dukungan dari Pemerintah terhadap Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dari Pusat, Provinsi dan Daerah yang semakin meningkat
2. Komitmen Mitra Kerja terhadap Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program PPPA semakin besar
3. Adanya Regulasi Pemerintah tentang Pengendalian Penduduk dan KB serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Kebijakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan Kesetaraan Gender di daerah

2.4.3 Kekuatan

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Sudah terbentuknya Gugus Tugas KLA Kab. Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak.
4. Adanya tenaga lini lapangan di 13 kecamatan (PKB/PLKB)
5. Adanya kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di masing-masing kampung (PPKBD dan sub PPKBD)
6. Adanya mitra kerja yang ada di setiap kampung (PKK, kader posyandu, faskes, IBI, Banbinsa, TNI)
7. Adanya kelompok kegiatan di kampung (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)

2.4.4 Kelemahan

1. Persentase Unmetneed masih tinggi
2. Masih kurangnya tenaga PKB dibandingkan dengan jumlah kampung yang ada
3. Kompetensi PKB yang masih kurang
4. Terbatasnya jumlah, cakupan dan kelengkapan data pilah dan sistem informasi tentang PUG, PPPA dan KB
5. Belum adanya komitmen OPD untuk melaksanakan PPRG
6. Kualitas SDM dan sarana prasarana DPPKBP3A masih kurang
7. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam upaya pemenuhan hak anak masih rendah

8. Kurangnya pemahaman tentang pemenuhan hak anak mulai tingkat kecamatan dan kampung
9. Sinkronisasi antara program keluarga berencana dan PPPA belum optimal

Berdasarkan analisis SWOT diatas maka faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Strategi SO (Memaksimalkan *Stregth* / Kekuatan untuk memanfaatkan *Opportunity*/peluang)
 - a. Meningkatkan koordinasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah.
 - b. Membangun komunikasi dan kerja sama dengan Mitra Kerja terhadap Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program PPPA.
 - c. Mengintegrasikan kebijakan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender ke dalam RPJMD
2. Strategi ST (Memaksimalkan *Strength*/Kekuatan untuk mengurangi Threat/ancaman)
 - a. Mengoptimalkan Gugus Tugas KLA Kab. Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak.
 - b. Meningkatkan kapasitas tenaga lini lapangan di 13 kecamatan (PKB/PLKB)
 - c. Mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kapasitas kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) di masing-masing kampung (PPKBD dan sub PPKBD)
 - d. Menjalni Kerjasama dengan mitra kerja yang ada di setiap kampung (PKK, kader posyandu, faskes, IBI, Banbinsa, TNI)
 - e. Meningkatkan kualitas pembinaan dan mengevaluasi kelompok kegiatan di kampung (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)

3. Strategi WO (Minimalkan *Weakness* / Kelemahan untuk menangkap *Opportunity* /peluang)
 - a. Melakukan Bimtek dan Pelatihan kepada PKB untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi
 - b. Mendorong OPD untuk melaksanakan PPRG dan optimalisasi data pilah Gender (Perempuan dan Anak) melalui sistem data Gender
 - c. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM serta peningkatan sarana prasarana DPPKBP3A
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam upaya pemenuhan hak anak
 - e. Melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak mulai tingkat kecamatan dan kampung
 - f. Meningkatkan sinkronisasi antara program keluarga berencana dan PPPA

4. Strategi WT (Meminimalkan *Weakness*/Kelemahan untuk menghindari *Threat*/ ancaman)
 - a. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada tenaga PKB yang ada
 - b. Mengoptimalkan Driver dan Vokal Point yang sudah terbentuk untuk mendorong OPD terkait agar melaksanakan PPRG dan data pilah Gender
 - c. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana DPPKBP3A yang ada
 - d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dalam upaya pemenuhan hak anak mulai tingkat kecamatan dan kampung
 - e. Melakukan evaluasi dan meningkatkan sinkronisasi antara program keluarga berencana dan PPPA

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS P2KBP3A KABUPATEN BERAU

Berdasarkan analisis terdapat capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam **tabel 3.1**:

Tabel 3.1 Permasalahan utama pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Berau

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya implementasi kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pembangunan	1. Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender	1. Belum terbentuknya vocal point di semua OPD 2. Kapasitas SDM driver dan OPD belum kompeten 3. Driver PUG belum di SK kan 4. kurangnya pemahaman OPD tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap kesetaraan gender atau PUG

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			3. Belum terbentuknya jaringan lembaga masyarakat peduli anak
			4. Belum terbentuknya asosisani perusahaan Sahabat Anak Indonesia
		4. Belum tersedianya sistim data gender dan anak	1. Belum tersedianya aplikasi data gender dan anak
			2. Belum optimal koordinasi data gender dan anak dengan instansi terkait
		5. Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pola asuh keluarga
3	Akses layanan Keluarga Berencana belum optimal	6. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 19 - 49 tahun yang cenderung menurun.	1. Aksesibilitas masih terbatas
			2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang program bangga kencana masih rendah
			3. Pelayanan KB belum maksimal
			4. tenaga medis yang berkompeten masih terbatas
			5. perekonomian masyarakat masih rendah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			6. Belum optimalnya fasilitas pendukung tenaga pendamping dan tenaga medis
			7. masih tingginya angka DO
			8. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi belum optimal
		7. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat	1. Belum tersusunnya grand design kependudukan di kab berau
			2. implementasi pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh di satuan pendidikan yang ada
			3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait
			4. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
			5. Masih kurangnya sinkronisasi dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan
		8. Masih tingginya angka kelahiran remaja 15 - 19 tahun	1. Pendampingan keluarga dalam pengasuhan anak dan remaja masih rendah
			2. Masih rendahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya peran

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			keluarga dalam pendampingan perawatan lansia
			3. Masih belum lengkapnya sarana dan prasana edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja
			4. Masih kurangnya keluarga yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga

Selain permasalahan utama/pokok diatas, masih terdapat permasalahan - permasalahan khusus berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau antara lain:

1. Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender
2. Masih tingginya Angka KDRT
3. Belum terbentuknya Kampung/Kelurahan Layak Anak
4. Belum tersedianya sistim data gender dan anak
5. Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
6. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 19 - 49 tahun yang cenderung menurun.
7. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat
8. Masih tingginya angka kelahiran remaja 15 - 19 tahun

Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) menjadi salah satu hal penting dalam Pengarusutamaan Gender (PUG). Di Kabupaten Berau berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun 2020 untuk IKK Urusan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten yaitu

Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD menunjukkan angka masih sangat kecil.

ARG adalah anggaran yang responsive terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Adapun ARG pada belanja langsung APBD Kab. Berau Tahun 2020 sebesar 1,70% atau sebesar Rp. 32.247.976.574,- terhadap Rp. 1.902.041.167.108,-.

Rendahnya prosentase ARG ini disebabkan antara lain oleh permasalahan sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya vocal point di semua OPD
2. Kapasitas SDM driver dan OPD belum kompeten
3. Driver PUG belum di SK kan
4. kurangnya pemahaman OPD tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap kesetaraan gender atau PUG
6. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dibidang sosial, politik, hukum dan ekonomi
7. Lemahnya akses perempuan terhadap institusi keuangan formal
8. lemahnya suara perempuan dalam pengampilan keputusan.

Angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi perhatian yang cukup besar dan menjadi target nasional untuk diturunkan, mengingat beberapa tahun terakhir terjadi kecenderungan kasus-kasus KDRT yang semakin meningkat.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (**KemenPPPA**), tahun 2020 menunjukkan dari seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan (5.573 kasus), mayoritas kasusnya adalah KDRT (3.419 kasus atau 60,75 persen). Persoalan KDRT merupakan persoalan publik yang secara nyata

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

Sehingga dibutuhkan sosialisasi dengan pendekatan khusus ke akar rumput dan komunitas agar masyarakat makin mengenal sejak dini jenis-jenis KDRT. Sosialisasi pencegahan KDRT harus lebih massif dilakukan dengan menggandeng banyak pihak. Persoalan KDRT disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. rendahnya pemahaman tentang pemahaman pola asuh keluarga
2. belum optimalnya Layanan pusat pembelajaran keluarga
3. belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak
4. Belum optimalnya layanan UPTD PPA
5. Masih kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga layanan PPA

Belum optimalnya pemenuhan hak anak mengakibatkan terhambatnya pencapaian target Kabupaten Berau untuk mencapai peringkat Madya dalam tahapan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kondisi ini tercermin dari hasil evaluasi terhadap capaian target Rencana Strategis DPPKBP3A tahun 2016-2021 dimana target pada tahun 2021 adalah pada peringkat Madya namun tidak tercapai, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum ada kebijakan yang mengakomodir KLA
2. Kurangnya pemahaman OPD-OPD terhadap Pemenuhan Hak Anak
3. Belum terbentuknya jaringan lembaga masyarakat peduli anak
4. Belum terbentuknya asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia

Memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut DPPKBP3A Kabupaten Berau mencoba untuk melakukan langkah-langkah terobosan dengan mengaktifkan peran masyarakat dalam berpartisipasi mendukung pencapaian target Kabupaten Layak Anak. Adapun upaya

yang akan dilakukan adalah dengan menginisiasi pembentukan kampung dan kelurahan layak anak sebagai model dimana diharapkan dengan adanya peran aktif dari kampung dan kelurahan akan mendorong pencapaian Kabupaten Berau sebagai Kabupaten Layak Anak.

System Informasi Gender dan anak bertujuan untuk menyediakan informasi terkini tentang perempuan dan anak, serta tersedianya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan terisolasinya data dan informasi terkini sebagai pembuka wawasan untuk mengetahui isu gender di berbagai bidang. Pengelolaan data yang dilakukan setiap Kabupaten/Kota terpilah menurut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan analisis gender untuk mengetahui apakah ada perbedaan posisi dan kondisi atau status dan kedudukan antara laki laki dan perempuan diberbagai bidang pembangunan. Data dan informasi sangat dibutuhkan sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan disemua bidang, tidak terkecuali pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perencanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan data gender dan anak yang sangat terkait dengan seluruh bidang pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, disebutkan pada Pasal 15 (1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang perlu mendapatkan perhatian dan diselesaikan. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Sementara itu, berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2018, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu

kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Di Kabupaten Berau kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan data tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.a Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ditangani pada UPTD PPA Kabupaten Berau tahun 2015 - 2020

Kasus Kekerasan	TAHUN						Total
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<i>perempuan</i>	13	15	24	24	12	13	101
<i>anak</i>	41	38	34	52	55	67	287
Total	54	53	58	76	67	80	388

Sumber : DPPKBP3A Kab. Berau, 2021

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Data capaian realisasi CPR di Kabupaten Berau menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu berkisar pada angka diatas 70% sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 meskipun pada tahun 2020 ada kecenderungan terjadi penurunan angka CPR, dapat dilihat pada tabel 3.1.b. berikut :

Tabel 3.1.b Data Capaian Realisasi CPR Kabupaten Berau tahun 2015 – 2020

Indikator	Target Nasional / Kaltim	TAHUN					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
CPR	Meningkat menjadi 65% / 66,21%	71,23%	73,65%	74,43%	76,28%	76,54%	74,24%

Sumber Data : Aplikasi Statistik Rutin Dalam (SR; 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020)

Namun demikian untuk tingkat kepesertaan ber KB di Kabupaten Berau secara umum pada tahun 2020 didominasi penggunaan alat kontrasepsi jangka pendek (79,5%), seperti pil dan suntik dan masih didominasi oleh kaum perempuan. Oleh karenanya dengan adanya advokasi dan KIE kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat beralih ke Alat Kontraspsi Jangka Panjang dan meningkatkan realisasi capaian untuk metode kontrasepsi MOP (Metode Kontrasepsi Pria). CPR sangat terkait erat dengan angka unmet need yaitu kebutuhan pasangan usia subur (PUS) untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah Tidak Ingin Anak Lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi. Sebagai gambaran dapat dilihat target kinerja sasaran Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) pada tabel 3.1.c sebagai berikut :

Tabel 3.1.c Target Kinerja Sasaran Program Bangsa Kencana Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur 2020 – 2024

Indikator Sasaran Program	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nasional Unmeet Need	%	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
Provinsi Kaltim Unmet Need		8,33	8,13	7,92	7,72	7,54

Sumber Data : Renstra 2020-2024 Perwakilan BKKBN Prov. Kaltim

Bila dibandingkan dengan capaian realisasi angka unmet need di Kabupaten Berau masih cukup tinggi yaitu mencapai 12,2% pada tahun 2020. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 10% pada tahun 2019, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,2%. Angka tersebut masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 8,6% dan target Provinsi Kaltim 8,33% pada tahun 2020. Artinya masih cukup butuh upaya lebih keras lagi untuk menurunkan

angka unmet need sehingga dapat mengejar target provinsi maupun nasional yang telah ditetapkan.

Kondisi tersebut diatas disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Aksesibilitas masih terbatas
2. Tingkat pemahaman masyarakat tentang program bangsa kencana masih rendah
3. Pelayanan KB belum maksimal
4. tenaga medis yang berkompeten masih terbatas
5. perkenomian masyarakat masih rendah
6. Belum optimalnya fasilitas pendukung tenaga pendamping dan tanaga medis
7. masih tingginya angka DO
8. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi belum optimal

Salah satu dari tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk adalah kelahiran (fertilitas), selain kematian (mortalitas) dan perpindahan (migrasi). Informasi tentang jumlah penduduk sangat penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan, demikian pula informasi tentang jumlah kelahiran diperlukan pemerintah dalam merencanakan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak. Untuk mengukur kelahiran, dapat dilihat dari CBR (Crude Birth Rate), TFR (Total Fertility Rate) dan ASFR (Age Specific Fertility Rate). ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan kelahiran menurut kelompok umur.

Secara Nasional Laju pertumbuhan penduduk Indonesia selama 10 tahun dari 2010 sampai 2020 mencapai rata-rata 1,25% per tahun dan melambat dibanding laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2000 sampai 2010 yaitu sebesar 1,49%. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Berau Jumlah penduduk di Kabupaten Berau terjadi kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada pada

tahun 2016 sebesar 214.828 jiwa sampai dengan 2020 menjadi 238.214 jiwa. Dan bila dilihat dari laju pertumbuhan penduduk terjadi kecenderungan meningkat, angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 sampai 2018 sebesar 2,68% dan pada tahun 2010 sampai 2020 laju pertumbuhan penduduk mencapai 3%. Melihat data tersebut kontribusi Kabupaten Berau terhadap laju pertumbuhan penduduk secara nasional cukup besar, dimana didalamnya terdapat peranan tingkat kelahiran dalam peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu disiapkan berbagai upaya untuk pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang merupakan prasyarat dalam pembangunan, yaitu dengan mengidentifikasi beberapa factor penyebabnya. Adapun masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Berau disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Belum tersusunnya grand design kependudukan di Kab. Berau
2. Implementasi pendidikan kependudukan yang belum menyeluruh di satuan pendidikan yang ada
3. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait
4. Belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan
5. Masih kurangnya sinkronisasi dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan

Pada tahun 2020 Angka kelahiran remaja pada usia 15-19 Tahun (ASFR) sebesar 18 per 1000 kelahiran. Meskipun angka ini berada dibawah target nasional sebesar 38 per 1000 kelahiran, namun apabila tidak dilakukan intervensi maka akan berpotensi pada munculnya permasalahan kesehatan serta permasalahan lainnya dan pada gilirannya akan berdampak terhadap kualitas keluarga secara umum.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah :

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan. ” Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah **Sejahtera** yang berarti Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahteraan berbudi luhur (terutama perempuan ; pemuda dan penyandang disabilitas) akan disesuaikan setelah penetapan RPJMD Kab. Berau 2021-2026.
2. Misi Kedua: Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sector hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan local.
3. Misi Ketiga: Meningkatkan sarana dan prasarana public yang berkualitas adil dan berwawasan lingkungan.
4. Misi Keempat: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian :

Misi Pertama : *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur terutama perempuan; pemuda dan penyandang disabilitas “* (akan disesuaikan setelah penetapan RPJMD Kab. Berau 2021-2026). Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah Kebijakan sektor kualitas sumber daya manusia akan diarahkan pada Integrasi Kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan; Meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga; Meningkatkan kapasitas sumber daya KLA dalam rangka pemenuhan hak anak; Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB; Penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengendalian penduduk; Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integrative.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia	1. Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender	1. Belum optimalnya fungsi	1. Sudah dibentuknya SK Bupati Berau

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.		koordinasi antar OPD tentang PUG 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap PUG / PPRG	475 Tahun 2016 tentang Pokja PUG Kab. Berau Periode 2016-2021 sebagaimana dirubah dengan SK Bupati No. 461 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Berau No. 475 Tahun 2016 2. Sk Bupati Berau No. 55 Tahun 2019 tentang Tim Penggerak/Driver PPRG di Kab. Berau
		2. Masih tingginya Angka KDRT	1. Pemahaman keluarga terhadap kualitas keluarga masih rendah 2. Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah 3. Ketahanan keluarga terutama perekonomian yang masih rendah	Adanya layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
		3. Belum terbentuknya Kp./Kel. Layak Anak	1. Masih kurangnya pemahaman dari OPD dan masyarakat	Sudah terbentuknya Gugus Tugas KLA Kab. Berau dengan SK Bupati

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(kampung dan kelurahan tentang KLA. 2. Belum sinkronnya perencanaan pemenuhan hak anak antar OPD terkait. 3. Belum optimalnya Gugus Tugas KLA di Kabupaten Berau	Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak.
		4. Belum tersedianya Sistim Data Gender Anak	1. Kurangnya koordinasi dengan PD terkait 2. Kurangnya pemahaman tentang Profil gender dan anak 3. Belum terbentuknya Tim penyusun Profil gender dan anak	Tersedianya sumber daya manusia pada PD sesuai tusi.
		5. Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	1. Luasnya cakupan wilayah layanan 2. Keterbatasan SDM untuk menjangkau wilayah	Adanya layanan UPTD PPA
		6. Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 19-49 tahun yang	1. Aksesibilitas yang masih rendah terhadap pelayanan 2. Tingkat	1. Adanya tenaga lini lapangan di 13 kecamatan (PKB/PLKB) 2. Adanya kader IMP di masing-

No.	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		cenderung menurun	Pendidikan masyarakat masih rendah sehingga pemahaman terhadap Program Bangga Kencana masih kurang 3. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi.	masing kampung (PPKBD dan sub PPKBD) 3. Adanya mitra kerja yang ada di setiap kampung (PKK, kader posyandu, faskes, IBI, Banbinsa, TNI) 4. Adanya kelompok kegiatan di kampung (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)
		7. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat	Belum adanya Grand Design Pembangunan Kependudukan.	Sudah terbentuknya PIK-R pada-sekolah yang akan difasilitasi sebagai Sekolah Siaga Kependudukan.
		8. Masih tingginya angka kelahiran remaja 15-19 tahun	1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak pernikahan dini 2. Masih rendahnya pemahaman kader di lapangan 3. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi.	1. Sudah terbentuknya PIK-R di sekolah 2. Sudah terbentuknya BKR di kampung-kampung

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran KPPA. Adapun analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3.1 berikut ini.

Tabel 3.3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran KPPA

No.	Sasaran Strategis KPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas hidup dan perempuan dalam pembangunan	Belum semua OPD memahami perencanaan penganggaran yang responsif gender	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap PUG / PPRG	1. Sudah dibentuknya SK Bupati Berau 475 Tahun 2016 tentang Pokja PUG Kab. Berau Periode 2016-2021 sebagaimana dirubah dengan SK Bupati No. 461 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Berau No. 475 Tahun 2016 2. Sk Bupati Berau No. 55 Tahun 2019 tentang Tim Penggerak/Driver PPRG di Kab. Berau
2	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak	• Belum optimalnya pemenuhan	1. Masih kurangnya pemahaman dari OPD dan	1. Sudah terbentuknya Gugus Tugas KLA

No.	Sasaran Strategis KPPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	hak anak • Masih terjadinya KDRT	masyarakat tentang KLA. 2. Belum sinkronnya perencanaan pemenuhan hak anak antar OPD terkait. 3. Belum optimalnya Gugus Tugas KLA di Kabupaten Berau 4. Pemahaman keluarga terhadap kualitas keluarga masih rendah 5. Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah 6. Ketahanan keluarga terutama perekonomian yang masih rendah	Kab. Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak. 2. Adanya layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan KG dan PHA			
4	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat, kondisi khusus dan perempuan			

No.	Sasaran Strategis KPPPA	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	korban PPO serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO			
5	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus			

3.3.2 Telaahan Renstra BKKBN

Telaahan faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Berau terhadap Renstra BKKBN 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Terhadap Sasaran Strategis BKKBN

No.	Sasaran Strategis BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan	1. Masih tingginya angka unmet need 2. Masih tingginya Laju	1. Aksesibilitas yang masih rendah terhadap pelayanan 2. Tingkat Pendidikan	1. Adanya tenaga lini lapangan di 13 kecamatan (PKB/PLKB) 2. Adanya kader IMP di masing-masing

No.	Sasaran Strategis BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024	3. Masih tingginya angka kelahiran remaja pada usia 15-19 tahun	masyarakat masih rendah sehingga pemahaman terhadap Program Bangga Kencana masih kurang	kampung (PPKBD dan sub PPKBD)
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) 61,78% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41% pada tahun 2024		3. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi.	3. Adanya mitra kerja yang ada di setiap kampung (PKK, kader posyandu, faskes, IBI, Banbinsa, TNI)
3	Menurunnya Kebutuhan ber KB yg tidak terpenuhi (unmetneed) dari 8,6% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4% pada tahun 2024		4. Rendahnya angka kepesertaan KB bagi PUS	4. Adanya kelompok kegiatan di kampung (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK-R)
4	Menurunnya Angka Kelahiran menurut kel umur 15-19 tahun (ASFR) dengan target 25 per 1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1000 kelahiran pada tahun 2024		5. Masih rendahnya pemahaman kader di lapangan	5. Tersedianya Alkon oleh pemerintah pusat kepada faskes di 13 kecamatan Kab. Berau.
			6. Rendahnya ketahanan keluarga khususnya ketahanan ekonomi.	6. Adanya Pelayanan KB bergerak yang di danaai oleh Biaya Operasional KB (DAK)
				7. Tersedianya tenaga PKB /PLKB di 13 kecamatan
				8. Sudah terbentuknya kader kelompok kegiatan di 13 kecamatan
				9. Adanya mitra kerja di 13 kecamatan (PKK, Posyandu, dll)

No.	Sasaran Strategis BKKBN	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (I Bangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024			
6	Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada tahun 2024			

3.3.3 Telaahan Renstra DKP3A Provinsi Kaltim

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DKP3A Provinsi Kaltim yang terkait dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.3.3 berikut ini:

Tabel 3.3.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau Terhadap Sasaran Strategis DKP3A Provinsi Kaltim

No	Sasaran Strategis DKP3A Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Masih terjadinya KDRT	1. Pemahaman keluarga terhadap kualitas keluarga masih rendah 2. Tingkat Pendidikan masyarakat yang masih rendah 3. Ketahanan keluarga terutama perekonomian yang masih rendah	Adanya layanan Peningkatan Kualitas Keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
2	Meningkatnya implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Belum semua OPD memahami perencanaan penganggaran yang responsif gender	1. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar OPD tentang PUG 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap PUG / PPRG	1. Sudah dibentuknya SK Bupati Berau 475 Tahun 2016 tentang Pokja PUG Kab. Berau Periode 2016-2021 sebagaimana dirubah dengan SK Bupati No. 461 Tahun 2018 tentang Perubahan

No	Sasaran Strategis DKP3A Provinsi	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				Keputusan Bupati Berau No. 475 Tahun 2016 2. Sk Bupati Berau No. 55 Tahun 2019 tentang Tim Penggerak/Drive r PPRG di Kab. Berau
3	Meningkatnya kualitas keluarga	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	1. Masih kurangnya pemahaman dari OPD dan masyarakat tentang KLA. 2. Belum sinkronnya perencanaan pemenuhan hak anak antar OPD terkait. 3. Belum optimalnya Gugus Tugas KLA di Kabupaten Berau	Sudah terbentuknya Gugus Tugas KLA Kab. Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak.
4	Meningkatnya penyajian data gender dan anak di tingkat Provinsi			

3.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau mendukung pencapaian target RPJMD Kab. Berau 2021-2026, sejalan dengan telaah terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026, dapat dilihat pada tabel. 3.4 Berikut :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi DPPKBP3A Kab. Berau (Nama Prog. yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan DPPKBP3A Kabupaten Berau	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Pemenuhan Hak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	1. Masih kurangnya pemahaman dari OPD dan masyarakat tentang KLA. 2. Belum sinkronnya perencanaan pemenuhan hak anak antar OPD terkait. 3. Belum optimalnya Gugus Tugas KLA di Kabupaten Berau	Sudah terbentuknya Gugus Tugas KLA Kab. Berau dengan SK Bupati Berau No. 738 tahun 2018, 26 Nopember 2018 tentang Pembentukan Gugus Tugas/Evaluasi Kab. Layak Anak.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.5.1 berikut ini.

Tabel 3.5.1 Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	Total	100

Hasil scoring masing-masing permasalahan dalam rangka penentuan isu strategis disajikan pada Tabel 3.5.2 berikut ini :

Tabel 3.5.2. Tabel Skoring Dalam Penentuan Isu-isu Strategis

NO.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor 1-5	bobot (%) 20	Skor 1-5	bobot (%) 20	Skor 1-5	bobot (%) 15	Skor 1-5	bobot (%) 15	Skor 1-5	bobot (%) 30		
1	Masih rendahnya Anggaran Responsif Gender	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
2	Masih tingginya Angka KDRT	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2
3	Belum terbentuknya Kp/Kel. Layak Anak	5	100	5	100	5	75	4	60	1	30	365	1
4	Belum tersedianya sistim data gender dan anak	4	80	4	80	4	60	3	45	1	30	295	7
5	Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	5	100	5	100	4	60	4	60	1	30	350	2

NO.	Permasalahan	Kriteria 1		Kriteria 2		Kriteria 3		Kriteria 4		Kriteria 5		Total	Ranking
		Skor	bobot (%)	Skor	bobot (%)	Skor	bobot (%)	Skor	bobot (%)	Skor	bobot (%)		
		1-5	20	1-5	20	1-5	15	1-5	15	1-5	30		
6	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 19 - 49 tahun yang cenderung statis.	5	100	4	80	4	60	4	60	1	30	330	5
7	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat	4	80	3	60	3	45	4	60	1	30	275	8
8	Masih tingginya angka kelahiran remaja 15 - 19 tahun	5	100	4	80	3	45	4	60	1	30	315	6

Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

1. Belum terbentuknya kampung/kel layak anak
2. Masih rendahnya anggaran responsive gender
3. Masih terjadinya KDRT
4. Masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
5. Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 19-49 tahun yang cenderung menurun
6. Masih tingginya angka kelahiran remaja 15 – 19 tahun
7. Belum tersedianya sistim data gender dan anak
8. Masih tingginya Laju pertumbuhan penduduk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DP2KBP3A

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Adapun tujuan DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah:

1. Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pembangunan
2. Meningkatkan efektifitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan
3. Meningkatnya akses Layanan Keluarga Berencana

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran dari DPPKBP3A Kabupaten Berau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Anggaran Responsif Gender
2. Menurunnya angka KDRT
3. Terbentuknya kampung/kelurahan layak anak
4. Tersedianya sistem data gender
5. Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak
6. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 19-49 Tahun
7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
8. Menurunnya angka kelahiran remaja 15-19 tahun

Tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau dijabarkan dalam table 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Tahun awal perencanaan renstra (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pembangunan		Presentase OPD yang sudah melaksanakan PPRG	42,6 %	52,17 %	61,73 %	71,30 %	80,87 %	90,43 %	100,00 %
		1. Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	1,70 %	2,00 %	2,30 %	2,60 %	2,90 %	3,20 %	3,50 %
2	Meningkatkan efektifitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan		Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani	13 %	12 %	11 %	10 %	9 %	8 %	7 %
			Jumlah Kasus Anak yang Ditangani	67 Kasus	65 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	59 Kasus	57 Kasus	55 Kasus
		2. Menurunnya angka KDRT	Rasio KDRT	0,008 %	0,007 %	0,005 %	0,003 %	0,002 %	0,002 %	0,002 %
		3. Terbentuknya Kp./Kel. Layak Anak	Persentase kampung/kel layak anak	0	0	2 %	3 %	4 %	6 %	7 %

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Tahun awal perencanaan renstra (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Belum tersedianya sistem data gender dan anak	Persentase OPD yang mempunyai data gender dan anak	0 %	0 %	6 %	9 %	11 %	13 %	15 %
		5. Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditangani	13 %	12 %	11 %	10 %	9 %	8 %	7 %
			Jumlah Kasus Anak yang Ditangani	67 Kasus	65 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	59 Kasus	57 Kasus	55 Kasus
3	Meningkatnya akses Layanan Keluarga Berencana		Menurunnya tingkat unmet need	12,2 %	12,2 %	11,4 %	10,6 %	9,9 %	9,2 %	8,6 %
		6. Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR begi Perempuan menikah usia 19-49 Tahun	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	00,00 %	00,00 %	00,00 %	00,00 %	00,00 %	00,00 %	74,87 %
		7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	2,55	2,83	2,79	2,77	2,74	2,72	2,72
		8. Menurunnya angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	19 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	17 per 1000 kelahiran	16 per 1000 kelahiran	15 per 1000 kelahiran	14 per 1000 kelahiran	13 per 1000 kelahiran

Tabel.4 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKBP3A Kabupaten Berau

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
1.	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender	%	Pelaksanaan PUG akan memberikan manfaat untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender . Percepatan PUG dapat di lakukan dengan melalui PPRG. Yang di tuangkan dalam ARG. Diharapkan ARG dapat di tuangkan dalam Program dan Kegiatan yang terkait dengan pelayanan(Service delivery), Mendukung prioritas pembangunan daerah dan Nasional, Serta percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kab. Berau ARG masih rendah yaitu 1,7% pada tahun 2020.	OPD (Penyusunan RKA di sertakan GAP dan GBS)	Jumlah Anggaran yang Responsif Gender / Jumlah Belanja Langsung APBD x 100 %
2.	Menurunnya angka KDRT	rasio kdrt	%	Tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak baik di ranah privat (KDRT) maupun di ranah public dengan spektrum yang semakin luas. Di	Pencatatan pada UPTD PPA	Jml Kasus KDRT pada perempuan dan anak yang ditangani oleh UPTD PPA dibagi Jml keluarga

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
				KABupaten Berau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat pada periode 2017 – 2020 dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,8% per tahun.		dikali 100%
3.	Terbentuknya Kampung/Kel . Layak Anak	Persentase Kampung/ Kel. Layak Anak	%	Keberhasilan PHA dapat diukur dari capaian score KLA. Kab. Berau sejak thn 2017 hingga saat ini thn 2020 masih berada pada peringkat pratama (score <600). Untuk mendorong percepatan KLA maka dilakukan inovasi dg membentuk Kp/Kel. Layak Anak.	DPPKBP3A	Penilaian dari 24 Indikator KLA oleh DPPKBP3A dan DPMK
4.	Belum tersedianya sistim data gender dan anak	Persentase OPD yang mempunyai i data gender dan anak	%	Dalam mendukung pemenuhan hak anak data gender anak sangat diperlukan dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian KLA.	PD KAB. BERAU	PD yang memiliki data gender dibagi dengan jumlah PD di Kabupaten Berau dikali 100%
5.	Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Jml kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang	kasus	Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di ranah public yang ditangani pada UPTD PPA	UPTD PPPA	Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
		ditangani pada UPTD PPA		membutuhkan penjangkauan dan pendampingan secara utuh dan menyeluruh melalui layanan mediasi, konseling, pendampingan dan pemulihan mental. Di Kabupaten Berau kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat pada periode 2017 – 2020 dengan peningkatan rata-rata sebesar 9,8% per tahun. Keberadaan UPTD PPA sangat penting hal ini sejalan dengan amanat dari UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Adapun target dari sasaran menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak sangat tergantung dari efektivitas pencegahan		yang ditangani pada UPTD PPA Kab. Berau

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
				melalui edukasi tentang pentingnya kualitas keluarga dan tingkat perekonomian keluarga.		
6.	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi Perempuan menikah usia 19-49 Tahun	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	%	UU 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum secara eksplisit pada ps 23 bahwa pemerintah dan Pemda wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, Pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi. Untuk pelayanan kontrasepsi UU tersebut di atas mengamanatkan agar kemanan , keterjangkauan, jaminan kerahasiaan serta ketersediaan alat, obat dan cara kontrasepsi yg bermutu wajib ditingkatkan seiring dengan penguatan kualitas SDM. Sehubungan hal tsb Pemda wajib mendukung tercapainya	Aplikasi SR, Laporan Prog KB Nasional, SIDUGA, DALAP dan PELKON	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi) dibagi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun berstatus kawin, yang dinyatakan dalam satuan persen (%).

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
				prioritas pembangunan RPJMN 2020 – 2024 dengan ukuran keberhasilan yg harus dicapai yaitu : Menurunnya angka kelahiran, meningkatnya angka CPR dan menurunnya unmeetneed.		
7.	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di Kabupaten	%	UU No. 52/2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum ps 17 : Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional yang berkelanjutan serta ps. 19 (2) disebutkan bahwa Pengendalian kuantitas penduduk	BPS Kab. Berau	

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
				dilakukan melalui : Pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk.		
8.	Menurunnya angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 thn	Hal ini berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) di Indonesia. "Hasil studi, organisasi kesehatan dunia atau WHO menyebutkan, salah satu masalah <i>stunting</i> karena tingginya pernikahan dini. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan ada 15,18% pernikahan dini dan mengalami peningkatan pada 2018 dengan angka 15,66%. Di Kabupaten Berau Masih kurangnya pemahaman orangtua terhadap	Dinas Kesehatan Kab. Berau, Kemenag, Dukcapil (pembagi)	Jumlah kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun pada tahun tertentu (Dinkes) dibagi jumlah perempuan umur 15-19 tahun pada periode yang sama (Dukcapil) dikali 1.000.

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Alasan	Sumber Data	Formulasi Hitungan
				pola asuh anak dan remaja Masih rendahnya pengetahuan tentang masalah gizi dan makanan dari jumlah dan kualitasnya. Masih rendahnya akses terhadap layanan kesehatan termasuk sanitasi dan air		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pembangunan	1	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	upaya yang dilakukan untuk meningkatkan anggaran responsif gender melalui: 1. Pelatihan pendampingan penyusunan anggaran responsif gender 2. Memberikan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG kepada OPD 3. Melakukan Sosialisasi kebijakan PUG	Integrasi Kebijakan PUG dan pemberdayaan perempuan dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
Meningkatkan efektifitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan	2	Menurunnya angka KDRT	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka KDRT melalui: 1. Memberikan Edukasi tentang pengasuhan positif, ketahanan keluarga, kebijakan keselamatan anak, konvensi hak anak, perkembangan anak kepada keluarga 2. Membentuk keluarga pelopor dan pelapor 3. Penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	• Pencegahan KDRT • Meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
	3	Terbentuknya Kp./Kel. Layak Anak	Upaya yang dilakukan untuk mendukung terbentuknya Kp./Kel. Layak Anak sesuai KHA melalui: 1. Melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan PHA 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan PHA 3. Melakukan KIE mengenai PHA secara intensif kepada semua pihak	Meningkatkan kapasitas sumber daya KLA dalam rangka pemenuhan hak anak

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	4	Tersedianya sistim data gender dan anak	Upaya yang dilakukan untuk menyediakan Sistem Data Gender Anak melalui: 1. Melakukan pengadaan aplikasi Sistim Data Gender dan Anak; 2. Melakukan Peningkatan Kapasitas Operator Aplikasi Sistim Data Gender dan Anak; 3. Sosialisasi Aplikasi Sistim Data Gender dan Anak pada Instansi terkait.	Melakukan pengadaan Sistim Data Gender dan Anak
	5	Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus kekerasan pada perempuan dan anak melalui : 1. Melakukan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak 2. Melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Melakukan upaya pencegahan kekerasan serta upaya penanganan korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak.
Meningkatkan akses Layanan Keluarga Berencana	6	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR begi Perempuan menikah usia 19-49 Tahun	Upaya untuk meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi pada perempuan menikah usia 19-49 tahun melalui: 1. Penguatan kapasitas faskes dan jejaringnya 2. Peningkatan jangkauan pelayanan kb di wilayah dan sasaran khusus 3. Penguatan promosi dan konseling 4. Pengadaan sarana dan prasarana petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 5. Peningkatan kemitraan dalam pelayanan	Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	7	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Upaya yang dilakukan untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan penduduk melalui: 1. Menyusun dan mengembangkan grand design pembangunan kependudukan 2. Melakukan fasilitasi pada sekolah untuk melaksanakan Pendidikan Kependudukan melalui pendidikan Formal dan Melakukan Kerjasama dengan Sekolah yang mengimplementasikan Bangsa Kencana 3. Menyediakan Pelayanan Masyarakat dalam hal ber KB (DAK-BOKB) 4. Sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan kebijakan pengendalian penduduk
	8	Menurunnya angka kelahiran remaja 15-19 tahun	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kelahiran remaja 15-19 tahun melalui: 1. Melaksanakan penyiapan pembinaan pembimbingan dan pembentukan kelompok PIK remaja, tribina dan UPPKA 2. Melaksanakan promosi dan sosialisaisi kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. LATAR BELAKANG

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan pada Tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Porsentase Terpenuhi nya Urusan Kantor	100%	100%	5.238.862.913	100%	6.754.397.872	100%	11.943.037.659	100%	8.196.741.425	100%	9.022.015.568	100%	9.966.735.124	100%	51.121.790.561
		2	14	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Pelaporan	100%	100%	59.998.600	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	146.410.000	100%	201.769.000	100%	772.277.600
		2	14	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renstra dan renja perangkat daerah (Renstra, RKA, DPA, Ev. Renja, RKA/DPA-P)	5 Jenis	5	49.999.600	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	5	70.000.000	26	212.819.600
		2	14	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP	1 Dokumen	1	9.999.000	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	6	132.101.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp	Target	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp	Target t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan LKPJ, PK, Smp Online, Tepra, Renja, Lap Evaluasi Renja, IKI, Lap F/K, LPPD, Rencana Aksi, PPID	9 Dokumen	9	-	13	70.000.000	13	77.000.000	13	84.700.000	13	93.170.000	13	102.487.000	74	427.357.000
		2	14	01	2	02		Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianyan Sistem Pelaporan Capaian Keuangan dan Barang	100%	100%	4.571.984.013	100%	5.357.265.692	100%	5.892.992.261	100%	6.482.291.487	100%	7.130.520.636	100%	7.843.572.700	100%	37.278.626.789
		2	14	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1	3.684.199.269	1	4.477.265.692	1	4.924.992.261	1	5.417.491.487	1	5.959.240.636	1	6.555.164.700	6	31.018.354.045
		2	14	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji Tenaga Kontrak dan Honor Pengelola Keuangan	12 Bulan	12	722.784.744	12	675.000.000	12	742.500.000	12	816.750.000	12	898.425.000	12	988.267.500	72	4.843.727.244
		2	14	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor Pengelola Keg Rutin	12 Bulan	12	165.000.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	12	241.576.500	12	1.172.341.500
		2	14	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Per Tahun	1 Dokumen		-	1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	5	122.102.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Tahun SKPD	Laporan Keuangan Bulanan	12 Laporan		-	12	20.000.000	12	22.000.000	12	24.200.000	12	26.620.000	12	29.282.000	12	122.102.000
		2	14	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Disiplin ASN	100%		-	100%	172.250.000	100%	189.475.000	100%	208.422.500	100%	229.264.750	100%	252.191.225	100%	1.051.603.475
		2	14	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas ASN dan Tenaga Kontrak	67 Orang (134 Stell)		-	134	101.930.000	147	112.123.000	163	123.335.300	177	135.668.830	194	149.235.713	815	622.292.843
		2	14	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	ASN/PTT yang Mendapatkan Bimtek	6 Orang		-	6	70.320.000	6	77.352.000	6	85.087.200	6	93.595.920	6	102.955.512	30	429.310.632
		2	14	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Administrasi Perkantoran	Prosentase Tersedianya Administrasi Perkantoran	100%	328.983.800	100%	431.882.180	100%	475.070.398	100%	522.577.438	100%	574.835.182	100%	632.318.700	100%	2.965.667.697
		2	14	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bola Lampu, dll	1 Paket	1	4.996.900	1	5.496.590	1	6.046.249	1	6.650.874	1	7.315.961	1	8.047.557	1	38.554.132
		2	14	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya ATK, Bahan Pembersih dan Perlengkapan	450 Buah / Botol / Kotak / Unit	450	100.000.000	500	110.000.000	550	121.000.000	600	133.100.000	650	146.410.000	700	161.051.000	700	771.561.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
								Kantor																
		2	14	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pembelian Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1	11.499.000	1	12.648.900	1	13.913.790	1	15.305.169	1	16.835.686	1	18.519.254	6	88.721.799
		2	14	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biaya Makan Minum Rapat/Tamu	1 Tahun	1	79.988.000	1	87.986.800	1	96.785.480	1	106.464.028	1	117.110.431	1	128.821.474	6	617.156.213
		2	14	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biaya Foto Copy, Jilid, Cetak	1 Tahun	1	17.499.900	1	19.249.890	1	21.174.879	1	23.292.367	1	25.621.604	1	28.183.764	6	135.022.403
		2	14	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Berlangganan Koran	972 Exmplar	972	5.000.000	1080	5.500.000	1188	6.050.000	1306	6.655.000	1436	7.320.500	1579	8.052.550	7561	38.578.050
		2	14	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Bahan Material	1 Paket			1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	5	305.255.000
		2	14	01	2	06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Tamu	1 Paket			1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	5	122.102.000
		2	14	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan Rapat Koordinasi/Konsultasi dalam dan luar daerah	194 Kali	194	110.000.000	215	121.000.000	237	133.100.000	260	146.410.000	286	161.051.000	315	177.156.100	1507	848.717.100
		2	14	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Porsentase Tersedianya Saprasi Penunjang Kerja	100%			100%	90.000.000	100	4.598.000.000	100%	106.300.000	100%	114.930.000	100%	123.923.000	100%	5.033.153.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01	2	07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	2 Buah			2	60.000.000	2	65.000.000	2	70.000.000	2	75.000.000	2	80.000.000	10	350.000.000
		2	14	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebeler Kantor	1 Paket			1	20.000.000	1	22.000.000	1	24.200.000	1	26.620.000	1	29.282.000	5	122.102.000
		2	14	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Kantor	1 Paket			1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.100.000	1	13.310.000	1	14.641.000	5	61.051.000
		2	14	01	2	07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0 Paket		-	0	0	1 Pt (Gedung Kantor DPPK BP3A, UPTD PPA, Puspa ga)	3.500.000.000	0		0		0		1	3.500.000.000
		2	14	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianyan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket			0		1 Pt (Sarpras Gedung Kantor DPPK BP3A, UPTD PPA, Puspa ga)	1.000.000.000	0		0		0		1	1.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Tersedianya Benda Pos dan Pembiayaan Air/Listrik	100%	12 Bulan	152.900.000	12 Bulan	171.000.000	12 Bulan	202.000.000	12 Bulan	233.000.000	12 Bulan	264.000.000	12 Bulan	295.000.000	12 Bulan	1.317.900.000
		2	14	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos yang tersedia	12 Bulan	12	2.200.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	72	32.200.000
		2	14	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bulan Pembayaran Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan	12	150.700.000	12	167.000.000	12	197.000.000	12	227.000.000	12	257.000.000	12	287.000.000	72	1.285.700.000
		2	14	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100	124.996.500	100%	422.000.000	100%	464.500.000	100%	511.050.000	100%	562.055.000	100%	617.960.500	100%	2.702.562.000
		2	14	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	432 UB	432	109.996.500	480	200.000.000	528	220.000.000	580	242.000.000	638	266.200.000	701	292.820.000	3359	1.331.016.500
		2	14	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebeler Kantor	1 Paket			1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	1	6.655.000	1	7.320.500	5	30.525.500
		2	14	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC, Laptop, Komputer, Printer	50 Unit	50	15.000.000	50	17.000.000	50	19.000.000	50	21.000.000	50	23.000.000	50	25.000.000	300	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	01	2	09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Gedung serbaguna	2 Unit			2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	2	133.100.000	2	146.410.000	10	610.510.000
		2	14	01	2	09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Gedung serbaguna	1 Paket			1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000	5	610.510.000
Meningkatnya akses Layanan Keluarga Berencana	Meningkatnya Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 19-49 Tahun	2	14	03				PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	0,00%	0,00%	478.142.056	0,00%	2.503.957.362	0,00%	2.724.353.098	0,00%	2.946.488.408	0,00%	3.170.537.248	0,00%	2.703.690.973	74,87 %	14.527.169.144
		2	14	03	2	01		Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, dan Informasi,dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan lokal	Klasifikasi Kampung KB	Dasar Berkembang Mandiri	264 0	258.142.056	245 1	723.957.362	236 1	796.353.098	217 2	870.488.408	198 3	946.537.248	189 3	331.690.973	189 3	3.927.169.144
		2	14	03	2	01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai kearifan Budaya Lokal	terlaksanya kegiatan sosialisasi, Promosi, KIE yang dilaksanakan di Kampung KB	13 kecamatan	13	99.999.000	13	550.000.000	13	605.000.000	13	660.000.000	13	715.000.000	13	77.000.000	78	2.706.999.000
				03	2	01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK	Tersedianya Pendampingan Operasional DAK Fisik dan DAK BOKB	13 kecamatan	13	158.143.056	13	173.957.362	13	191.353.098	13	210.488.408	13	231.537.248	13	254.690.973	78	1.220.170.144

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	03	2	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tersedianya Sapras Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	unit		-	1	1.637.708.600	1	1.801.479.460	1	1.981.627.406	2	2.179.790.147	2	2.397.769.161	2	9.998.374.774
		2	14	03	2	01	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB (DAK Fisik)	Tersedianya Sapras Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	unit		-	1	1.637.708.600	1	1.801.479.460	1	1.981.627.406	2	2.179.790.147	2	2.397.769.161	2	9.998.374.774
		2	14	03	2	03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kot a	Menurunnya tingkat unmet need	12,20%	12,2%	220.000.000	12,0%	1.780.000.000	11,9%	1.928.000.000	11,8%	2.076.000.000	11,7%	2.224.000.000	11,6%	2.372.000.000	11,6%	10.600.000.000
		2	14	03	2	03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terdistribusiny a alokon sesuai kebutuhan faskes	23 Faskes			23	260.000.000	23	286.000.000	23	312.000.000	23	338.000.000	23	364.000.000	115	1.560.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	03	2	03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	Jumlah Petugas Pengelola dan Petugas Logistik Alokon yang faham mengenai Kompetensi Pengelola dan Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta sarana penunjang Pelayanan KB	23 Orang			23	250.000.000	23	275.000.000	23	300.000.000	23	325.000.000	23	350.000.000	115	1.500.000.000
		2	14	03	2	03	04	Penyediaan dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Teratasinya kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	5 Kasus			5	120.000.000	5	132.000.000	5	144.000.000	5	156.000.000	5	168.000.000	25	720.000.000
		2	14	03	2	03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Peserta KB yang terbina pasca Pelayanan	260 Akseptor			260	250.000.000	270	275.000.000	280	300.000.000	290	325.000.000	300	350.000.000	1400	1.500.000.000
		2	14	03	2	03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KB dan KR	Jumlah Tenaga pelayanan KB dan KR yang meningkat komptensinya	30 Orang		120.000.000	30	400.000.000	30	410.000.000	30	420.000.000	30	430.000.000	30	440.000.000	150	2.220.000.000
		2	14	03	2	03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor yang dilayani	Kali	13	100.000.000	4	400.000.000	4	440.000.000	4	480.000.000	4	520.000.000	4	560.000.000	33	2.500.000.000
		2	14	03	2	03	13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Peserta KB Pria baru	3 Akseptor			3	100.000.000	3	110.000.000	3	120.000.000	3	130.000.000	3	140.000.000	15	600.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	2	1 4					PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,55	2,83	3.533.357.500	2,83	2.852.241.500	2,83	2.699.531.500	2,83	2.979.531.500	2,83	3.184.531.500	2,83	3.184.531.500	2,83	18.433.7 25.000
		2	1 4	2	2	0 1		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan Implementasi pedidikan kependuduka n di sekolah Kabupaten Berau	SSK	0	1.488.826.000	10	407.710.000	10	130.000.000	15	285.000.000	20	365.000.000	20	265.000.000	80	2.941.53 6.000
		2	1 4	2	2	0 1	0 1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kab/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Tersedianya Sarana Prasarana Gedung Balai Penyuluhan KB di kecamatan	2 Unit	2	1.488.826.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	2	1.488.82 6.000
		2	1 4	2	2	0 1	0 2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Desaign Pembangunan (GDPK) diTingkat Kabupaten / Kota	Tersusunnya Dokumen GDPK Kabupaten 5 Pilar	1 Dokume n	0	-	1	269.910.000	0	-	0	0	0	0	0	0	1	269.910. 000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	2	2	01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS , Jalur Formal dan Informal	Jumlah Sekolah yang difasilitasi untuk melaksanakan Pendidikan Kependudukan melalui pendidikan Formal	10 Sekolah	0	-	10	50.000.000	10	50.000.000	15	150.000.000	20	175.000.000	25	200.000.000	80	625.000.000
		2	14	2	2	01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal	Jumlah Kerjasama DPPKBP3A dengan Sekolah yang mengimplementasikan Bangsa Kencana	5 Sekolah	0	-	5	62.800.000	5	50.000.000	10	100.000.000	15	150.000.000	20	20.000.000	55	382.800.000
		2	14	2	2	01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program (KKBP)	Laporan Bangsa Kencana	1 Laporan	0	-	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	5	175.000.000
		2	14	2	2	02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Pengelolaan Program Kependudukan , Keluarga Berencana , dan Pembangunan Keluarga			2.044.531.500	100%	2.444.531.500	100%	2.569.531.500	100%	2.694.531.500	100%	2.819.531.500	100%	2.919.531.500	100%	15.492.189.000
		2	14	2	2	02	03	Penyusunan Profil Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Tersusunnya Profil KKBPK Kependudukan	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	225.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	2	2	02	04	Pemetaan Kependudukan	Terlayannya Masyarakat dalam hal ber KB (DAK-BOKB)			2.044.531.500	169 Kegiatan	2.044.531.500	169 Kegiatan	2.044.531.500	169 Kegiatan	2.044.531.500	169 Kegiatan	2.044.531.500	169 Kegiatan	2.044.531.500	169 Kegiatan	12.267.189.000
		2	14	2	2	02	08	Membentuk Rumah data Kependudukan di kampung KB untuk memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor lain	rumah data yang terbentuk di kampung kb	10		-	20	100.000.000	30	150.000.000	40	200.000.000	45	250.000.000	50	275.000.000	50	975.000.000
		2	14	2	2	02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara n Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Meningkatnya pelayanan faskes dibidang KB dan pencatatan dan pelaporan dibidang dalduk	23 Faskes	0	-	23	150.000.000	23	200.000.000	23	250.000.000	23	300.000.000	23	350.000.000	23	1.250.000.000
	Menurunnya angka kelahiran remaja 15-19 tahun	2	14	4				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	19 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	319.951.210	17 per 1000 kelahiran	901.461.000	16 per 1000 kelahiran	1.100.000.000	15 per 1000 kelahiran	1.319.000.000	14 per 1000 kelahiran	1.481.000.000	13 per 1000 kelahiran	1.693.000.000	13 per 1000 kelahiran	6.814.412.210
2		14	4	2	01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Remaja Terpapar Informasi TRIAD KRR: 1. Pernikahan Dini; 2. Seks	Jumlah Remaja		159.951.706	500 Remaja	700.000.000	500 Remaja	900.000.000	550 Remaja	1.150.000.000	650 Remaja	1.300.000.000	700 Remaja	1.500.000.000		5.709.951.706	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
									Pranikah; 3. Napza.																
		2	14	4	2	01		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok kegiatan yang dibentuk	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 23 KELO MPO K BKL, 41 KELO MPO K UPPKA	74.999.900	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	150.000.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	200.000.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	250.000.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	300.000.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	350.000.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPKA	1.324.999.900		
		2	14	4	2	02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	PENGADAAN GENRE KIT SIAP NIKAH DAN BKB KIT STUNTING	Kelompok	0	-	5 Kelompok PIK R dan 5 Kelompok BKB	100.000.000	5 Kelompok PIK R dan 5 Kelompok BKB	150.000.000	5 Kelompok PIK-R dan 5 Kelompok BKB	200.000.000	5 Kelompok PIK-R dan 5 Kelompok BKB	250.000.000	5 Kelompok PIK-R dan 5 Kelompok BKB	300.000.000	1.000.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	14	4	2	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Pameran UPPKA ke Provinsi dan Pusat, Genre Educamp			84.951.806	4 kali	300.000.000	4 kali	350.000.000	4 kali	450.000.000	4 kali	450.000.000	4 kali	500.000.000		2.134.951.806	
		2	14	4	2	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lomba yang dilaksanakan		0	-	5 Jenis perlombaan	150.000.000	5 Jenis perlombaan	200.000.000	5 Jenis perlombaan	250.000.000	5 Jenis perlombaan	300.000.000	5 Jenis perlombaan	350.000.000	5 Jenis Perlombaan	1.250.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	1	4	4	2		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	Kelompok		159.999.504	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	201.461.000	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	200.000.000	Tercapai nya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	169.000.000	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	181.000.000	Tercapainya Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Kelompok :	193.000.000		1.104.460.504
								1. Kelompok BKB					15		30		45		60		73			
								2. Kelompok BKR					3		6		9		12		17			

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									3. Kelompok BKL				5		10		15		20		23			
									4. Kelompok PIK-R				7		14		21		28		37			
									5. Kelompok Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPP KS				8		16		24		32		41			
		2	14	4	2	03		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPK S)	Jumlah Kelompok yang diibina	Kelompo k		109.999.754	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPK A	201.461.000	5 KELO MPO K PIK R, 2 KELO MPO K BKB, 5 KELO MPO K BKR, 2 KELO MPO K BKL, 2 KELO MPO K UPPK A	200.000.000	5 KELOM POK PIK R, 2 KELOM POK BKB, 5 KELOM POK BKR, 2 KELOM POK BKL, 2 KELOM POK UPPKA	169.000.000	5 KELO MPOK PIK R, 2 KELO MPOK BKB, 5 KELO MPOK BKR, 2 KELO MPOK BKL, 2 KELO MPOK UPPK A	181.000.000	5 KELO MPOK PIK R, 2 KELO MPOK BKB, 5 KELO MPOK BKR, 2 KELO MPOK BKL, 2 KELO MPOK UPPK A	193.000.000		1.054.460.754
		2	14	4	2	04		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Terlaksanan n ya Pembinaan dan Evaluasi Kel, BKB,BKR,BK L	7 Pasang	7	49.999.750												49.999.750

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan intensitas kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Pembangunan	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender	2	0	0				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DANPEMBERD AYAAN PEREMPUAN	Presentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1,70%	2,00 %	903.499.700	2,30 %	1.250.000.000	2,60%	1.350.000.000	2,90 %	1.587.000.000	3,20 %	1.868.100.000	3,50 %	2.201.790.000	3,50 %	9.160.38 9.700
		2	0	0	2			Pelembagaan Pengarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Presentase OPD Yang melakukan PPRG	42,6%	52,17 %	496.000.000	61,73 %	350.000.000	71,30 %	420.000.000	80,87 %	504.000.000	90,43 %	604.800.000	100%	725.760.000	100%	3.100.56 0.000
		2	0	0	2	0	3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	20 OPD	21	346.000.000	26	200.000.000	31	240.000.000	36	288.000.000	41	345.600.000	47 OPD	414.720.000	47 OPD	1.834.32 0.000
		2	0	0	2	0	4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Orang yang faham akan PUG PPRG	40 Orang	40	150.000.000	40	150.000.000	40	180.000.000	40	216.000.000	40	259.200.000	40	311.040.000	40	1.266.24 0.000
		2	0	0	2	2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyyyarakata n Kewenangan Kabupaten Kota	Presentase Keterlibatan Pempuan dalam Pengambilan Keputusan dan Jabatan Publik	15%	15%	347.499.900	17%	400.000.000	19%	470.000.000	21%	553.000.000	23%	651.500.000	26%	768.490.000	26%	3.190.48 9.900

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	0	0	2	2	0	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang berpartisipasi dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	120 Orang	120	272.499.900	120	300.000.000	120	360.000.000	120	432.000.000	120	518.400.000	120	622.080.000		2.504.979.900
		2	0	0	2	0	0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Perempuan yang mengikuti pelatihan	40 Orang	6	75.000.000	30	100.000.000	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000		685.510.000
		2	0	0	2	2	0	3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga yang diberdayakan dengan baik			59.999.800	1 Lembaga	500.000.000	1 Lembaga	460.000.000	1 Lembaga	530.000.000	1 Lembaga	611.800.000	1 Lembaga	707.540.000		2.257.539.800
		2	0	0	2	2	0	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Yang mengikuti Pelatihan	40 Orang			40	200.000.000	40	220.000.000	40	242.000.000	40	266.200.000	40	292.820.000		1.221.020.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	02	203	03		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	- Jumlah pelaksanaan expose pemberdayaan perempuan	2 kali		59.999.800	2 kali	300.000.000	2 kali	240.000.000	2 kali	288.000.000	2 kali	345.600.000	2 kali	414.720.000	2 kali	1.648.319.800
Meningkatkan efektivitas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Pembangunan	Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani	13 %	12 %	1.242.672.522	11 %	650.000.000	10 %	775.000.000	9 %	900.000.000	8 %	1.025.000.000	7 %	2.650.000.000	7 %	7.242.672.522
		2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen pencegahan kekerasan terhadap perempuan	dok	1	60.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1 dok	560.000.000
		2	08	03	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Rapat Koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50 Orang	50 Orang	60.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	75.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	125.000.000	50 Orang	150.000.000	300 orang	560.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	1 lembaga	1 lembaga	649.999.922	1 lembaga	300.000.000	1 lembaga	350.000.000	1 lembaga	400.000.000	1 lembaga	450.000.000	1 lembaga	500.000.000	1 lembaga	500.000.000	1 lembaga	2.649.999.922
		2	08	03	2	02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang datang ke Layanan P2TP2A	100%	100%	649.999.922	0%	0	0%	-	0%	0	0%	0	0%	0	100%	649.999.922		
		2	08	03	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK)	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang memerlukan Layanan Rujukan	13 Kasus	12		11	300.000.000	10	350.000.000	9	400.000.000	8	450.000.000	7	500.000.000	7	2.000.000.000		
		2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Layanan perlindungan perempuan korban kekerasan sesuai standar			532.672.600	6 unit / 2 set alat tes psikologis	300.000.000	6 unit / 2 set alat tes psikologis	350.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	450.000.000	6 unit	2.000.000.000		4.032.672.600		

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	03	2	03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Prasarana UPT PPA			6 unit / 2 set alat psikologis	300.000.000	6 unit / 2 set alat psikologis	350.000.000	6 unit	400.000.000	6 unit	450.000.000	6 unit	2.000.000.000	6 unit	3.500.000.000	
		2	08	03	2	03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Cakupan dan Kualitas Layanan UPTD PPA	100%	100%	532.672.600									100%	532.672.600		
	Menurunnya angka KDRT	2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio KDRT	0,008%	0,007%	205.348.044	0,005%	864.190.000	0,003%	1.149.500.000	0,002%	1.275.000.000	0,002%	1.510.000.000	0,002%	2.995.000.000	0,002%	7.999.038.044
		2	08	04	2	01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang dilayani Puspaga	orang		205.348.044	2120 orang	504.190.000	2220 keluar ga	679.500.000	2320 keluarga	750.000.000	2420 keluar ga	835.000.000	2520 keluar ga	920.000.000	2520 keluar ga	3.894.038.044

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	04	2	01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Puspaga	1950 orang	2000 Orang	205.348.044	2100 Orang	354.190.000	2200 Orang	479.500.000	2300 Orang	500.000.000	2400 Orang	535.000.000	2500 orang	570.000.000	2500 orang	2.644.038.044
		2	08	04	2	01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga Pelopor dan Pelapor yang dibentuk dan dibina	Keluarga			20 keluarga	150.000.000	20 keluarga	200.000.000	20 keluarga	250.000.000	20 keluarga	300.000.000	20 keluarga	350.000.000		1.250.000.000
		2	08	04	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang dikuatkan dan dikembangkan	1 layanan (Puspaga)	1 layanan (Puspaga)	-	1 layanan (Puspaga)	360.000.000	1 layanan (Puspaga)	470.000.000	1 layanan (Puspaga)	525.000.000	1 layanan (Puspaga)	675.000.000	1 layanan (Puspaga)	2.075.000.000	1 layanan (Puspaga)	4.105.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	04	2	02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumberdaya Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	- 36 OB - 9 Unit	- 36 OB - 9 Unit		- 36 OB - 11 Unit	300.000.000	- 36 OB - 12 Unit	400.000.000	- 36 OB - 13 Unit	450.000.000	- 36 OB - 14 Unit	600.000.000	- 36 OB - 15 Unit	2.000.000.000	- 36 OB - 15 Unit	3.750.000.000
		2	08	04	2	02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang		3 orang	60.000.000	4 orang	70.000.000	4 orang	75.000.000	4 orang	75.000.000	4 orang	75.000.000	4 orang	355.000.000	
	Tersedianya sistim data gender dan anak	2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang mempunyai data gender dan anak	%	0%	-	6 %	-	9 %	200.000.000	11 %	200.000.000	13 %	200.000.000	15 %	200.000.000	15 %	800.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	05	2	01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Profil Gender Anak Kabupaten Berau	Dokumen	0		1	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000
		2	08	05	2	01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya sistem aplikasi data gender dan anak	aplikasi					1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000
	Terbentuknya Kp./Kel. Layak Anak	2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kampung/Kel Layak Anak	0	0%	290.199.600	2 %	560.000.000	3 %	670.000.000	4 %	775.000.000	5 %	830.000.000	6 %	885.000.000	6 %	4.010.199.600
		2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Evaluasi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	0 Dokumen	1 dokumen	180.199.600	1 dokumen	360.000.000	1 dokumen	420.000.000	1 dokumen	475.000.000	1 dokumen	530.000.000	1 dokumen	585.000.000	1 dokumen	2.550.199.600

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	06	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan			10	350.000.000	10	400.000.000	10	450.000.000	10	500.000.000	10	550.000.000	10	2.250.000.000
		2	08	06	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Anak (KLA) dan evaluasinya	Dok		180.199.600	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	300.199.600
		2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa) yang dikuatkan dan dikembangkan	OPD/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Media Masa		110.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	200.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	250.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	300.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	300.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	300.000.000	20 (OPD/lembaga masyarakat/dunia usaha/media massa)	1.460.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	08	06	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembentukan, Pembinaan & Evaluasi Forum Anak Kab, Kec Kamp & Kel	34 FA	34	110.000.000	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000.000
		2	08	06	2	02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang ditangani dilakukan	2 kegiatan			2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	250.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan	300.000.000	2 Kegiatan
	Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak	2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah kasus anak yang ditangani	67	65	249.999.550	63	1.500.000.000	61	1.735.000.000	59	1.915.000.000	57	2.195.000.000	55	2.475.000.000	55	10.069.999.550	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang memahami pentingnya mencegah kekerasan terhadap anak			-	0,124 %	600.000.000	0,124 %	750.000.000	0,124 %	850.000.000	0,124 %	1.050.000.000	0,124 %	1.250.000.000	0,124 %	4.500.000.000
		2	08	07	2	01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	3 Kegiatan			3	450.000.000	3	550.000.000	3	600.000.000	3	750.000.000	3	800.000.000	3	3.150.000.000
		2	08	07	2	01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap anak	Orang			50 orang	150.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	250.000.000	50 orang	300.000.000	50 orang	450.000.000	50 orang	1.350.000.000
		2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	1 lembaga	1 lembaga	-	1 lembaga	700.000.000	1 lembaga	760.000.000	1 lembaga	815.000.000	1 lembaga	870.000.000	1 lembaga	925.000.000	1 lembaga	4.070.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	07	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya operasional layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	67 Kasus Anak	62		63	650.000.000	61	700.000.000	59	750.000.000	57	800.000.000	57	850.000.000	57	3.750.000.000
		2	08	07	2	02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rapat koordinasi antar Lembaga	2 Kali			2	50.000.000	25	60.000.000	25	65.000.000	25	70.000.000	25	75.000.000	25	320.000.000
		2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya	OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll		249.999.550	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	200.000.000	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	225.000.000	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	250.000.000	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	275.000.000	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	300.000.000	15 (OPD/UPT PPA/UPPA/RS/Puskesmas dll)	1.499.999.550

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
											2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
1	2	3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	08	07	2	03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	SDM layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang meningkat kapasitasnya	25 Orang		249.999.550	25 orang	200.000.000	25 orang	225.000.000	25 orang	250.000.000	25 orang	275.000.000	25 orang	300.000.000	25 orang	1.499.999.550
JUMLAH												12.462.033.095		17.836.247.734		24.346.422.257		22.093.761.333		24.486.184.316		28.954.747.598		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

7.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Berau Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	1,70 %	2,00 %	2,30 %	2,60 %	2,90 %	3,20 %	3,50 %
2	Rasio kdrt	0,008%	0,007%	0,005%	0,003%	0,002%	0,002%	0,002%
3	Persentase Kampung/Kel Layak Anak	0 %	0%	2%	3%	4%	6%	7%
4	Persentase OPD yang mempunyai data gender dan anak	0 %	0 %	6%	9%	11%	13%	15%
5	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	13%	12%	11%	10%	9%	8%	7%
6	Jumlah Kasus Anak yang ditangani	67 Kasus	65 Kasus	63 Kasus	61 Kasus	59 Kasus	57 Kasus	55 Kasus
7	Laju pertumbuhan penduduk	2,55	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
8	Prosentasi PUS Menjadi Peserta KB (CPR)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	74,87 %
9	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	19 per 1000 kelahiran	18 per 1000 kelahiran	17 per 1000 kelahiran	16 per 1000 kelahiran	15 per 1000 kelahiran	14 per 1000 kelahiran	13 per 1000 kelahiran

BAB VIII

PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran. Sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan

secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan, diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;
2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LAMPIRAN